

**PERTANIAN PADI KABUPATEN JOMBANG MASA REVOLUSI HIJAU
TAHUN 1998-2010****Chusnul Nurainin**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : chusnul.19069@mhs.unesa.ac.id

Drs. Agus Trilaksana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
agustrilaksana@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Pertanian Padi Kabupaten Jombang Masa Revolusi Hijau Tahun 1998-2010” berisi tentang kebijakan dan implementasi kegiatan pertanian padi di Kabupaten Jombang selama masa Revolusi Hijau kurun waktu tahun 1998-2010. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan program studi S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian sejarah antara lain heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan pertanian bahwa kebijakan pertanian di Kabupaten Jombang selama tahun 1998-2010 diarahkan pada pertanian agribisnis. Implementasi dari kegiatan pertanian padi di Kabupaten Jombang selama tahun 1998-2010 masih belum mengarah pada aspek-aspek pertanian agribisnis. Implementasi pertanian padi berbasis agribisnis di Kabupaten Jombang memiliki banyak kendala sektor hulu maupun sektor hilir.

Kata kunci : Pertanian Padi, Revolusi Hijau, Kabupaten Jombang**Abstract**

This research entitled "Rice Farming in Jombang Regency during the Green Revolution Period 1998-2010" contains the policies and implementation of rice farming activities in Jombang Regency during the Green Revolution period 1998-2010. The purpose of this research is to fulfill some of the requirements for obtaining a Bachelor of Education degree in the Bachelor of History Education study program, Surabaya State University. This research used the historical research method. The steps taken in historical research include heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the research show that agricultural policies in Jombang Regency during 1998-2010 were directed at agribusiness farming. The implementation of rice farming activities in Jombang Regency during 1998-2010 still did not lead to aspects of agribusiness farming. The implementation of agribusiness-based rice farming in Jombang Regency has many obstacles in the upstream and downstream sectors.

Keywords: Rice Agriculture, Green Revolution, Jombang Regency

UNESA
Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang dikenal sebagai penghasil gabah beras. Gabah beras menjadi komoditas utama pertanian Kabupaten Jombang sehingga padi merupakan produk pertanian yang paling banyak ditanam di seluruh kecamatan. Kegiatan pertanian padi di daerah ini didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah seperti kebijakan Revolusi Hijau yang ada sejak era Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 tidak menyurutkan penerapan kebijakan Revolusi Hijau di Kabupaten Jombang. Revolusi Hijau tetap diberlakukan di Kabupaten Jombang meskipun pada tahun 1998 Presiden Soeharto sebagai penggagas gerakan modernisasi pertanian telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Revolusi Hijau kemudian tetap dilaksanakan setelah tahun 1998 dengan menekankan pada pengembangan kegiatan agroindustri sehingga era perkembangan pertanian masa ini disebut sebagai era Revolusi Hijau II.¹

Pasca Orde Baru fokus kegiatan pertanian diarahkan pada kebutuhan pasar sehingga sasaran utama Revolusi Hijau II tidak hanya mengantarkan Indonesia sebagai negara berswasembada beras pada abad 21 namun juga lebih memperhatikan aspek pendapatan petani guna menyejahterakan kehidupan para petani. Pemerintah Kabupaten Jombang turut serta melaksanakan poin-poin Revolusi Hijau II dibuktikan dengan adanya peraturan daerah yang mengarahkan pertanian Kabupaten Jombang ke dalam kegiatan agroindustri khususnya pada aspek pertanian padi. Berdasarkan fakta diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa kegiatan pertanian padi di Kabupaten Jombang telah memasuki era pertanian berbasis agribisnis yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar.

Melihat arah kebijakan pertanian tersebut maka sudah semestinya petani di Kabupaten Jombang memiliki sarana pertanian yang memadai untuk menunjang kegiatan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian. Kegiatan pertanian Kabupaten Jombang yang dilakukan di lapangan sejak tahun 1998 menunjukkan terdapat beberapa permasalahan mendasar seperti ketersediaan air, pupuk, penggunaan teknologi, dan penanganan hama masih menjadi masalah utama pertanian di Kabupaten Jombang. Hasil studi lapangan pada tahun 2000-an menunjukkan masih banyak petani yang kurang mendapatkan suplai air untuk kegiatan irigasi. Masing-masing petani masih berjuang untuk mendapatkan fasilitas pertanian yang memadai dari pemerintah hingga tahun 2007 mulai ada perhatian pemerintah terhadap jaringan-jaringan irigasi secara lebih intensif di Kabupaten Jombang.²

Permasalahan lain yang dialami oleh petani di Kabupaten Jombang selain terbatasnya akses irigasi adalah tingginya harga sarana produksi yang mereka gunakan dalam kegiatan pertanian. Krisis ekonomi tahun 1997 membuat petani Kabupaten Jombang mengalami kesulitan dalam memperoleh pestisida.³ Harga pupuk melambung tinggi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak beberapa tahun setelahnya sehingga petani mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka. Petani Kabupaten Jombang yang kesulitan memenuhi kebutuhan sarana produksi bagi pertanian padi pada akhirnya beralih menanam tebu. Harga jual gabah yang rendah juga menyulitkan petani terutama ketika petani mengalami musim paceklik akibat serangan hama maupun bencana alam. Kenaikan produksi beras memang terjadi di Kabupaten Jombang namun hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur bahwa seluruh proses kegiatan pertanian di Kabupaten Jombang telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Ketersediaan jaringan irigasi, alat-alat pertanian, pupuk, pestisida dan benih, serta tingginya biaya dalam bertani yang masih bermasalah menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan pertanian agribisnis pada tanaman padi telah dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Jombang. Fakta di lapangan melalui beberapa sumber surat kabar menunjukkan dinamika setiap permasalahan pertanian padi di Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilakukan untuk mengulas lebih jauh mengenai penerapan Revolusi Hijau II di Kabupaten Jombang yang dilakukan mulai tahun 1998-2010 dan kendala yang dihadapi petani beserta penanganannya dengan berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam program Revolusi Hijau tahun 1998-2010?
2. Bagaimana implementasi Revolusi Hijau dalam rangka perkembangan agroindustri pertanian padi di Kabupaten Jombang tahun 1998-2010?
3. Bagaimana dampak penerapan Revolusi Hijau bagi usaha pertanian padi Kabupaten Jombang pada tahun 1998-2010?

Tahun 1998 menjadi awal dilakukannya penelitian karena pada tahun tersebut Presiden Soeharto sebagai penggagas awal gerakan Revolusi Hijau di Indonesia lengser dari jabatannya sebelum kebijakan Repelita VI selesai dilaksanakan. Fakta lain di lapangan menunjukkan bahwa sejak krisis ekonomi tahun 1997 terjadi di Indonesia, banyak petani di Kabupaten Jombang yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan sarana produksi pertanian khususnya pestisida dan pupuk karena harganya yang melambung

¹ Abbas, S. 1999. *Revolusi Hijau dengan Swasembada Beras dan Jagung*. Jakarta, Setdal Bimas.

² Surya. 2007. "Bupati Suyanto Buka Normalisasi Irigasi 5 Desa". Koran Surya, 21 Desember 2007.

³ Soelaksono, B., dkk 2003 "Pola Penanaman dan Pemasaran Padi di Desa Mojosari, Kabupaten Jombang Tahun 2001" *Laporan Lapangan Lembaga Penelitian SMERU dengan Research School of Pacific and Asian Studies of the Australian National University.*

tinggi. Tahun 1998 juga terjadi peralihan orientasi Revolusi Hijau dari yang awalnya mengarah pada penggunaan teknologi di bidang pertanian menjadi pertanian berwawasan agroindustri untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun berakhirnya penelitian ini karena pada tahun tersebut terdapat peralihan teknik pertanian menjadi pertanian organik yang dilakukan tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian sejarah, Gilbert J. Garraghan menjelaskan metode sejarah merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis, bertujuan untuk memberikan bantuan dalam proses pengumpulan sumber, menilai sumber secara kritis, dan menyajikan fakta-fakta sumber tersebut sebagai sintesis dalam bentuk tertulis.⁴ Tahapan dalam melakukan penelitian sejarah terdiri dari heuristik yaitu proses mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang diperlukan, kritik sumber yaitu proses pengujian sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern, interpretasi atau penafsiran yaitu tahap mencari hubungan antara berbagai fakta yang telah ditemukan, serta historiografi yaitu tahap penulisan sejarah.

Penelitian ini menggunakan sumber lisan dengan melakukan wawancara bersama orang sezaman yaitu pelaku peristiwa dan saksi mata peristiwa. Proses pengumpulan sumber lisan wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai petani-petani maupun petugas penyuluh lapangan yang menjadi pelaku kegiatan pertanian di Kabupaten Jombang pada kurun waktu 1998-2010. Sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa arsip dan surat kabar. Arsip yang digunakan dalam proses pengumpulan sumber adalah salinan Surat Keputusan dan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang selama kurun waktu tahun 1998-2010, Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dan data produksi padi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang yang tertuang dalam dokumen Jombang Dalam Angka. Sumber berupa surat kabar yang dikumpulkan berasal dari koran Kompas, koran Surya, dan koran Republika. Sumber-sumber tersebut kemudian akan diteliti lebih dalam dalam proses kritik sumber.

Kritik sumber yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kritik intern. Kritik intern pada sumber dilakukan untuk membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh pihak-pihak yang diwawancarai, dokumen arsip dan surat kabar yang ditemukan memang dapat dipercaya. Kegiatan kritik intern berusaha untuk mencari hubungan intrinsik antara beberapa fakta yang diperoleh melalui wawancara dan penelusuran sumber tertulis agar dapat dipahami secara sistematis. Dokumen peraturan daerah

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang kemudian dihubungkan dengan fakta di lapangan yang tertulis dalam surat kabar dan kesaksian petani dalam wawancara untuk mengetahui kaitan antara topik penelitian dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Kegiatan interpretasi atau penafsiran sumber sejarah dilakukan melalui upaya menghidupkan pokok kajian objek penelitian dan menganalisis lebih dalam mengenai sumber-sumber penelitian yang berkaitan dengan fakta dan tema penelitian. Fakta yang telah ditemukan kemudian ditafsirkan dengan menggunakan ilmu bantu pertanian dan agroindustri supaya dapat menjelaskan fakta di lapangan dari sudut pandang pertanian secara lebih dalam. Penafsiran tersebut menghasilkan suatu pemikiran berupa sintesis mengenai keadaan pertanian Kabupaten Jombang pada tahun 1998-2010 sesuai dengan sumber yang telah ditemukan. Historiografi menjadi tahap terakhir dalam penelitian ini dengan dilakukannya penyusunan hasil interpretasi berdasarkan data menjadi karya tulisan. Penelitian ini kemudian ditulis menjadi sebuah karya skripsi berjudul **"Pertanian Padi Kabupaten Jombang Masa Revolusi Hijau Tahun 1998-2010"**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pertanian Kabupaten Jombang pada tahun 1998-2010 memuat program-program yang tidak jauh berbeda dengan kebijakan pertanian di era Orde Baru seperti program Intensifikasi Pertanian, Bimbingan Massal, hingga Sistem Pengendalian Hama Terpadu. Fokus tujuan kebijakan pertanian Kabupaten Jombang pasca Orde Baru diarahkan pada intensifikasi pertanian berwawasan agribisnis untuk meningkatkan efisiensi produksi, menekankan pada keunggulan kompetitif dan komparatif dalam pemanfaatan sumber daya pertanian, serta pengikutsertaan petani dalam usaha peningkatan perekonomian pedesaan.⁵ Pemerintah mengembangkan wawasan agroindustri untuk meningkatkan pendapatan petani yang diselenggarakan melalui Intensifikasi Berwawasan Agroindustri (INBIS).⁶ INBIS dilakukan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah dalam kegiatan produksi untuk lebih meningkatkan peran kemitraan, pengembangan kegiatan on farm dan off farm, pengelolaan hasil panen, pemasaran hasil, dan standarisasi.

Pemerintah Kabupaten Jombang menerapkan kebijakan Gema Palagung 2001 (Gerakan Mandiri

⁵ Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang. 1998. *Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998/1999*. Kabupaten Jombang, hal. 6.

⁶ Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang. 1999. *Keputusan Bupati Nomor 21A Tahun 1999 Tentang Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999/2000*. Kabupaten Jombang, hal. 5.

⁴ Kasdi, Aminuddin., Wisnu, Rojil N.B.A. 2018. *Memahami Sejarah*. Surabaya, Unesa University Press, hal 10.

Padi, Kedelai, dan Jagung di tahun 2001).⁷ Program ini merupakan upaya khusus yang dilakukan untuk meraih kembali swasembada beras serta mencapai swasembada kedelai dan jagung pada tahun 2001. Upaya khusus Gema Palagung 2001 dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional yang diawali pada musim tanam 1998/1999. Gema Palagung memiliki sasaran peningkatan produksi padi pada musim tanam 1998 sebesar 2.145 ton gabah kering giling melalui mutu intensifikasi seluas 7.150 Ha, 6.250 ton gabah kering giling melalui perluasan areal seluas 2.500 Ha dan meningkatkan produksi padi pada masa tanam 1998/1999 sebesar 10.050 ton melalui peningkatan mutu intensifikasi seluas 33.500 Ha. Perluasan tanam padi dilakukan di 14 wilayah kecamatan dimana setiap kecamatan memiliki tim penggerak yang bertugas memandu kelompok tani maupun petani dalam melaksanakan program Gema Palagung 2001. Perluasan areal pertanian terus dilakukan hingga musim tanam tahun 1999 jumlah areal pertanian bertambah seluas 14.300 Ha, dan pada musim tanam 1999/2000 bertambah seluas 33.500 Ha.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan bantuan berupa biaya tanam, biaya garap, benih, pupuk, dan obat-obatan untuk penanaman padi disetiap tahunnya. Dukungan finansial tersebut digunakan petani untuk menjalankan usaha pertanian mereka dalam menjalankan kegiatan pertanian maupun mengatasi kemungkinan kerugian yang akan dialami petani. Petani mendapatkan pinjaman modal melalui bank-bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyalurkan Kredit Usaha Tani (KUT).⁸ Keuntungan dari hasil penjualan padi yang memiliki pinjaman wajib diserahkan untuk kas daerah sebesar 50% melalui Kantor Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sebesar 10% wajib disetorkan oleh petani kepada Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai biaya operasional dan sebesar 40% menjadi hak petani sepenuhnya.

Petani yang mendapatkan keuntungan lebih dari hasil panen mereka berhak mendapatkan keuntungan tersebut secara penuh. Petani Kabupaten Jombang mendapatkan bantuan keuangan lainnya seperti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang diluncurkan pada tahun 2008 oleh Kementerian Pertanian RI. Program PUAP ini

memberikan bantuan sebesar Rp 100.000.000 per desa yang kemudian dialokasikan untuk para petani di Kabupaten Jombang. Setiap petani mendapatkan Rp 1.000.000 sehingga dalam satu desa terdapat 100 orang petani yang mendapatkan bantuan dari program ini.⁹

Pemerintah Kabupaten Jombang juga memberikan subsidi pupuk untuk menunjang keberhasilan program intensifikasi pertanian pada musim tanam tahun 1998 dan 1998/1999. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang kebutuhan dan penyaluran serta harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Jombang tahun anggaran 2006. Pihak yang berperan sebagai produsen pupuk adalah PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik.¹⁰

Pola tanam yang dianjurkan Pemerintah Kabupaten Jombang melalui data yang telah diperoleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah adalah pola tanam jajar legowo. Petani mulai dikenalkan dengan pola tanam jajar legowo pada musim tanam tahun 1999/2000.¹¹ Pola tanam yang dikembangkan pada tahun 2007 adalah pola tanam System Rice Intensification (SRI). Sistem SRI dikembangkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sebagai sistem pertanian organik sejak tahun 2007.¹² Pola tanam SRI dianggap mampu memperbaiki kualitas dan kesuburan tanah sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Pola tanam SRI merupakan pendekatan pertanian dengan cara memberikan kondisi yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman padi. Prinsip pola tanam SRI adalah bersinergi sehingga seluruh komponen teknologi pertanian dapat saling menunjang satu sama lain sehingga hasil panen secara keseluruhan dapat meningkat.

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 tahun 1999 membagi tahun irigasi menjadi 2 masa irigasi yaitu irigasi musim hujan dan irigasi musim kemarau. Tanaman utama yang harus

⁷ Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang. 1998. *Keputusan Bupati Nomor 73 Tahun 1998 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, dan Jagung 2001 (Gema Palagung 2001)*. Kabupaten Jombang, hal. 3.

⁸ Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang. 1999. *Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pengguliran Dana Proyek Bantuan Denfarm Tanaman Padi Sistem Legowo dan DEMPOLT Pengembangan Jagung Hibrida Pada Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang*. Kabupaten Jombang.

⁹ Wawancara dengan Pak Fauzi selaku Petugas Penyuluh Lapangan Kecamatan Bandarkedungmulyo.

¹⁰ Bupati Kabupaten Jombang. 2006. *Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2006*. Kabupaten Jombang.

¹¹ Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang. 1999. *Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pengguliran Dana Proyek Bantuan Denfarm Tanaman Padi Sistem Legowo dan DEMPOLT Pengembangan Jagung Hibrida Pada Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang*. Kabupaten Jombang, hal 2.

¹² Surya. 2009. "Mentan Puji Pola Tanam SRI Jombang". Koran Surya, 13 Agustus 2009.

ditanam petani pada musim hujan adalah tanaman padi. Kriteria daerah tanaman padi yang mendapatkan irigasi musim hujan adalah daerah dengan bibit padi rendengan dan daerah dengan tanaman padi gadu selama tanaman tersebut masih membutuhkan air. Pemberian air di musim penghujan tidak diberlakukan apabila sawah daerah irigasi berada dalam keadaan luar biasa yang menyebabkan kerusakan tanaman apabila diberikan air irigasi tambahan.

Tanaman utama yang harus ditanam petani pada musim kemarau adalah tanaman palawijo. Kriteria daerah tanaman padi yang mendapatkan irigasi musim kemarau adalah padi gadu mulai dari masa pembibitan hingga persiapannya dan padi rendengan yang dimajukan termasuk pembibitan beserta dengan persiapannya. Kriteria lahan yang dapat ditanami padi gadu pada musim kemarau berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1999 adalah tanah dalam keadaan biasa namun tidak dapat ditanami dengan baik di musim penghujan karena bahaya banjir. Kriteria lainnya adalah tanah yang pada musim kemarau memang tidak bisa ditanami padi karena musim kemarau Panjang, dan tanah yang dianggap perlu ditanami padi di musim kemarau karena pada musim sebelumnya tanaman rusak akibat bencana sehingga rakyat menderita kerugian.

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, kegiatan pertanian padi di Kabupaten Jombang diarahkan pada pertanian agroindustri sebagai upaya menunjang produktivitas pertanian padi dan meningkatkan pendapatan petani. Agroindustri adalah industri yang memanfaatkan hasil pertanian untuk diolah menjadi produk bernilai tambah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan lebih. Agroindustri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan komiditi pertanian, oleh karena itu agroindustri dapat dipandang sebagai sistem usaha pertanian mulai dari produksi bahan baku, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian.

Fakta dalam lapangan menunjukkan kegiatan pertanian padi di Kabupaten Jombang mulai tahun 1998 hingga tahun 2010 masih kurang mencerminkan implementasi pertanian berbasis agroindustri. Pelaksanaan pertanian di Kabupaten Jombang justru masih jauh dari poin-poin agroindustri karena dalam penerapan subsistem agroinput masih belum terpenuhi secara maksimal. Petani Kabupaten Jombang belum mampu memenuhi kebutuhan subsistem agroindustri hulu dilihat dari masih banyaknya permasalahan dalam menyediakan sarana produksi pertanian. Permasalahan subsistem hulu antara lain penyediaan benih, pupuk, pestisida, hingga kegiatan irigasi yang masih sulit didapatkan petani. Kesulitan mendapatkan sarana produksi yang layak dan lengkap akan menghambat proses penanaman padi bahkan dapat memundurkan waktu tanam padi dari musim tanam yang telah ditentukan.

Petani Kabupaten Jombang telah menggunakan bibit padi varietas unggul berlabel biru. Mayoritas petani Kabupaten Jombang menggunakan benih padi Cisadane, Ciherang, dan Membramo. Jenis benih padi lainnya yang ditanam oleh petani Kabupaten Jombang adalah IR-64, Widas, Digul, Wai Apu Buru, Sintanuriah, dan Kalimas. Petani tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan benih, mereka justru mengalami kesulitan dalam menyediakan pupuk, pestisida, dan teknologi modern penunjang pertanian. Harga pestisida terus mengalami peningkatan sejak tahun 1998 dipicu oleh adanya krisis ekonomi tahun 1997. Harga pestisida yang naik menyulitkan petani dalam mengatasi hama pada musim tanam tahun 2001 sehingga membuat petani kesulitan membeli pestisida dan menggantikannya dengan menggunakan sabun deterjen atau karbit sebagai pengganti pestisida. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berusaha membasmi hama dengan menanam padi sekaligus memelihara ikan di sawah, memelihara bebek, dan menyemprotkan air bawang putih atau lada hitam sebagai pengganti pestisida.

Harga pupuk yang terus meningkat membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk mereka, disisi lain terjadi kelangkaan pupuk di Kabupaten Jombang sehingga petani mulai beralih menggunakan pupuk Amina atau tetes tebu yang berasal dari limbah pabrik Ajinomoto padahal penggunaan pupuk Amina dapat menyebabkan kerusakan pada tanah. Petani juga menggunakan pupuk supramin mulai tahun 2003, penggunaan pupuk ini dinilai dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur tanah dan membuat tanah menjadi mengeras seperti tanah liat sehingga tanaman tidak dapat tumbuh secara normal. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melarang penggunaan dan peredaran pupuk Supramin dengan melakukan sosialisasi kepada petani mengenai dampak buruk pupuk Supramin. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mengupayakan agar harga pupuk di pasaran sesuai dengan HET yang telah ditentukan namun dengan adanya kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005 mempengaruhi biaya transportasi, ongkos produksi, dan biaya bongkar muat sehingga menyebabkan harga pupuk mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

Teknologi pertanian yang digunakan petani Kabupaten Jombang dalam pertanian padi antara lain traktor, sabit bergerigi, alat dan mesin panen, dan mesin perontok padi. Petani belum banyak yang memiliki mesin pertanian secara mandiri sehingga hal ini menjadi masalah baru bagi petani karena mereka harus mengeluarkan biaya sewa supaya usaha pertanian mereka dapat dilaksanakan secara intensif. Petani di Kabupaten Jombang biasanya menyewa teknologi pertanian kepada kelompok tani atau pihak-pihak yang menyediakan penyewaan mesin pertanian. Meningkatnya penggunaan teknologi pertanian di Kabupaten Jombang mengakibatkan pertanian tradisional dengan menggunakan tenaga sapi untuk membajak sawah semakin jarang ditemukan.

Petani kecil yang tidak memiliki teknologi pertanian sendiri tidak dapat menghemat biaya produksi karena mereka harus menyewa mesin pertanian. Pemerintah Kabupaten Jombang telah memberikan beberapa bantuan peralatan pertanian namun bantuan tersebut dianggap kurang merata dan kurang tepat sasaran sehingga belum mampu membantu meringankan pekerjaan petani secara keseluruhan. Keterbatasan teknologi pertanian dapat menghambat efisiensi produksi padi. Petani yang memiliki teknologi terbatas berpotensi mengalami kerugian ekonomi terutama ketika hasil pertanian mereka sedang turun dan memburuk setelah terkena hama atau bencana alam.

Jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Jombang tergolong cukup banyak namun jumlah jaringan irigasi tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan air para petani. Jaringan irigasi menjadi salah satu aspek penting dalam agroindustri hulu karena jaringan irigasi merupakan salah satu bagian dari sarana produksi dalam pertanian. Beberapa daerah di Kabupaten Jombang belum bisa memanfaatkan saluran irigasi dari sungai-sungai dengan baik sehingga banyak petani yang melakukan irigasi pompanisasi menggunakan mesin diesel.

Jaringan irigasi yang kurang baik menyebabkan wilayah Kecamatan Wonosalam, Bareng, Ngoro, Mojowarno, dan Mojoagung terancam tidak teraliri air karena rusaknya jaringan irigasi di sejumlah wilayah tersebut akibat banjir bandang di Wonosalam akhir Januari 2006. Permasalahan mengenai sistem irigasi yang kurang memadai di beberapa daerah Kabupaten Jombang terus dibenahi oleh pemerintah dengan membangun waduk dan embung atau tandon air. Pembangunan waduk dilakukan pada tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Jombang kembali melakukan pembangunan 10 embung pada tahun 2007 di daerah utara Sungai Brantas. Kegiatan pertanian di Kabupaten Jombang mulai menunjukkan kemajuan karena pemerintah dan otoritas terkait berusaha untuk berperan aktif dalam mengelola infrastruktur air, menjalankan inspeksi rutin, dan memastikan keamanan serta fungsi jaringan irigasi dengan baik pada tahun 2007.

Permasalahan yang dialami petani selain teknologi kurang memadai, sistem irigasi, dan permasalahan pupuk adalah serangan hama. Sawah-sawah di daerah Kecamatan Plandaan dan Kesamben mendapatkan serangan hama tikus pada tahun 2003. Daerah lain yang terkena wabah hama tikus antara lain Desa Jatimlerek, Gebang Bunder, Kampung Baru, Bangsri, dan Puri Karangrejo. Para petani mengatasi serangan hama tikus dengan melakukan Gropyokan setiap malam dimulai pukul 18.00-24.00 WIB.¹³ Gropyokan adalah istilah yang merujuk pada tindakan memburu tikus dengan tujuan membasmi hama tikus. Gropyokan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih ada di masyarakat Kabupaten Jombang, selain membasmi tikus kegiatan ini juga mampu

menumbuhkan sikap gotong royong dan tolong menolong antar petani karena gropyokan tidak dapat dilakukan secara individu. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan bantuan 10 unit Emposan/Gamma (alat mengemposkan belerang ke lubang tikus), racun tikus Racumin 2kg, dan 40kg klerat.¹⁴ Bantuan tersebut disebar ke beberapa daerah kecamatan yang terserang hama tikus.

Kegiatan pasca panen dalam pertanian padi meliputi penjualan gabah, petani Kabupaten Jombang menjual gabah mereka kepada Bulog. Permasalahan yang terjadi di antara para petani Kabupaten Jombang adalah harga gabah mereka dibeli dengan tarif rendah oleh Bulog. Harga jual gabah yang rendah mengakibatkan petani merugi terutama ketika petani mengalami gagal panen akibat bencana alam atau serangan hama. Catatan harian koran Surya pada tahun 2008 menampilkan fakta harga gabah di beberapa wilayah Kabupaten Jombang turun hingga Rp 160.000/kuintal. Petani juga sering mendapatkan kerugian karena harga jual gabah yang turun terutama ketika petani tidak mampu memenuhi syarat-syarat dari Bulog.

Harga gabah yang rendah menunjukkan bahwa petani tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan harga jual gabah. Petani tidak memiliki kuasa untuk melawan Bulog ataupun tengkulak yang menetapkan harga jual gabah. Akibatnya kerugian yang dialami petani akan terus terjadi apabila harga jual gabah selalu dibawah rata-rata. Penjualan gabah petani ke pengumpul gabah di lapangan merupakan aspek agroindustri hilir. Fakta bahwa petani tidak mampu mengatur harga gabah untuk keuntungan mereka sendiri menunjukkan manajemen hilir dalam agroindustri di pertanian Kabupaten Jombang masih belum memberikan keuntungan bagi petani.

DAMPAK REVOLUSI HIJAU BAGI USAHA PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG

Kebijakan pertanian Kabupaten Jombang yang diarahkan pada pertanian agroindustri membawa beberapa dampak positif dan negatif bagi kegiatan pertanian padi wilayah ini. Kegiatan pertanian selama kurun waktu tahun 1998-2005 memiliki kendala irigasi yang cukup serius bahkan kendala tersebut dimasukkan oleh pemerintah dalam Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005.¹⁵ Pembangunan waduk di Kabupaten Jombang baru dilaksanakan mulai kurun waktu 2006-2010. Pembangunan jaringan irigasi menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mendorong keberhasilan agroindustri pertanian. Normalisasi saluran irigasi juga dilakukan pemerintah untuk membantu meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan mengoptimalkan desai dan struktur saluran

¹⁴ Republika. 2003 "Hama Tikus Diduga Serang Ratusan Hektar Lahan Padi". Koran Republika, 28 Juni 2003.

¹⁵ Bupati Kabupaten Jombang. 2001. *Keputusan Bupati Nomor 47A Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001-2005*. Kabupaten Jombang, hal 17.

¹³ Republika. 2003. "Hama Tikus Mulai Menyerang". Koran Republika, 25 Juni 2003.

sehingga air dapat didistribusikan secara merata ke seluruh lahan pertanian yang terhubung dengan jaringan irigasi.

Kebijakan Revolusi Hijau mendorong petani padi Kabupaten Jombang untuk menggunakan teknologi modern dalam kegiatan pertanian mereka. Petani mengalami peralihan penggunaan teknologi sebagai dampak dari Revolusi Hijau pertama di masa Orde Baru. Pembangunan pertanian di Kabupaten Jombang terus mengalami perkembangan dari kurun waktu tahun 1998-2010. Wujud modernisasi bidang pertanian adalah banyaknya petani yang menggunakan alat pertanian modern, pupuk kimia, pestisida, dan benih varietas unggul sebagai upaya meningkatkan produksi pertanian.

Dampak sosial yang terjadi akibat sistem pertanian agribisnis di Kabupaten Jombang adalah menurunnya tingkat pekerja di sektor pertanian. Fenomena ini disebabkan oleh faktor biaya pertanian yang tidak murah sehingga banyak dari masyarakat petani Kabupaten Jombang memilih untuk beralih pekerjaan. Masyarakat lebih memilih untuk bekerja di pabrik dengan gaji yang pasti daripada bertani karena merasa keuntungan dalam sektor pertanian kurang mampu meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Urbanisasi mulai terjadi sejak tahun 2001 menyebabkan terjadinya kelangkaan tenaga kerja sehingga petani yang masih berkecimpung dalam bidang pertanian menghadapi konsekuensi kenaikan biaya produksi. Biaya upah buruh yang mahal mengakibatkan petani tidak dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan dari hasil panen mereka.

Masyarakat Kabupaten Jombang yang enggan bekerja di sektor pertanian lebih memilih untuk menyewakan lahan mereka ke pabrik gula. Mereka meninggalkan pekerjaan sektor pertanian untuk meraih kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Modernisasi pertanian juga mengakibatkan budaya tradisional di Kabupaten Jombang menghilang. Kegiatan sukarela gotong royong dan sistem bawon yang digunakan ketika panen maupun dalam kegiatan menanam padi telah digantikan dengan mesin-mesin pertanian modern. Kegiatan panen yang dahulu dilakukan dengan sistem bawon kini tidak pernah lagi dilakukan karena kemudahan melakukan panen melalui teknologi. Kehadiran mesin selep keliling membuat petani lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan panen sehingga petani hanya perlu menyewa maksimal tiga orang penebas dalam melakukan kegiatan panen.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam program Revolusi Hijau II tahun 1998-2010 diarahkan pada pertanian agribisnis. Prinsip pertanian agribisnis lebih memperhatikan orientasi pasar sehingga perlu memperhatikan subsektor hulu dan hilir dalam pelaksanaan kegiatan pertanian. Pertanian agroindustri menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan diiringi dengan usaha meningkatkan keseimbangan sistem produksi. Pertanian agroindustri

memiliki subsektor yang luas antara lain yaitu subsektor agroindustri hulu dan agroindustri hilir. Pelaksanaan agroindustri pertanian di Kabupaten Jombang tahun 1998-2010 belum dilaksanakan dengan baik dan belum bisa dikatakan berhasil karena petani belum mampu memenuhi kebutuhan subsistem agroindustri hulu seperti benih padi, pupuk, pestisida, saluran irigasi, dan peralatan pertanian.

Keberhasilan kegiatan pertanian berbasis agribisnis di Kabupaten Jombang dapat dinilai dari ketersediaan sektor sarana produksi sebagai subsistem agroindustri hulu dan kegiatan pemasaran sebagai subsistem agroindustri hilir. Berdasarkan temuan di lapangan kegiatan pertanian berbasis agroindustri di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai pertanian agribisnis yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Keberhasilan yang terlihat menonjol dari pembangunan pertanian Kabupaten Jombang terletak pada di bidang modernisasi sarana produksi pertanian di mana pembangunan waduk bagi kegiatan irigasi terus dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 untuk menunjang subsistem agroindustri hulu dan penggunaan alat-alat modern bagi kegiatan pertanian.

Tantangan petani Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 1998-2010 secara general terpusat pada persediaan sarana produksi dan jaringan irigasi. Kebutuhan akan sarana produksi terus ditambah oleh Pemerintah Kabupaten Jombang agar dapat melaksanakan poin-poin pertanian agribisnis. Pemerintah memberikan bantuan subsidi pupuk maupun pestisida untuk menekan harga keduanya agar tidak terlampaui tinggi. Jaringan irigasi juga terus dibangun hingga tahun 2010 sehingga memudahkan petani untuk mendapatkan akses air untuk pengairan sawah. Petani mendapatkan kesulitan untuk mengakses teknologi pertanian karena mereka belum mampu membeli peralatan pertanian secara mandiri sehingga dalam melaksanakan kegiatan pertanian mereka menyewa dari petani lain atau dari kelompok tani. Teknologi pertanian yang disewa biasanya adalah traktor dan mesin disel untuk memompa air.

Keberhasilan subsistem agroindustri hilir didasarkan pada kelancaran kegiatan pemasaran hasil panen. Kegiatan pemasaran gabah di Kabupaten Jombang justru memiliki beberapa permasalahan yang menyulitkan petani sehingga penerapan subsistem agroindustri hilir juga terlaksana dengan kurang baik. Masalah tersebut berkaitan dengan harga gabah yang turun ketika menjelang musim panen sehingga harga gabah petani tidak sesuai dengan Harga Pedoman Pemerintah (HPP) yang seharusnya, hal ini menyebabkan petani mengalami kerugian. Permasalahan ini diselesaikan dengan solusi bahwa Bulog membeli gabah sebanyak mungkin dari petani agar petani tidak mengalami kerugian karena banyak tengkulak yang menolak gabah para petani.

Modernisasi pertanian di Kabupaten Jombang menyebabkan petani tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional, mereka beralih menggunakan alat-alat

pertanian modern dan sarana produksi modern dalam kegiatan pertanian mereka. Wujud modernisasi bidang pertanian adalah banyaknya petani yang menggunakan alat pertanian modern, pupuk kimia, pestisida, dan benih varietas unggul sebagai upaya meningkatkan produksi pertanian. Modernisasi pertanian di Kabupaten Jombang berkesinambungan dengan pertanian berbasis agribisnis yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Wujud kesinambungan ini adalah masifnya pembangunan infrastruktur pertanian yang semakin bertambah untuk mendukung sektor hulu agroindustri pertanian padi. Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan normalisasi saluran irigasi untuk memperlancar kegiatan irigasi dan membangun 5 waduk tambahan. Pembangunan waduk Pembangunan waduk-waduk baru tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah mengenai pentingnya sistem irigasi dalam menunjang kegiatan pertanian. Pembangunan saluran irigasi baru di Kabupaten Jombang mampu meningkatkan produksi pertanian padi di setiap tahunnya sejak tahun 2006.

SARAN

Saran untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Jombang untuk beberapa waktu kedepan adalah dengan menambah jumlah saluran irigasi khususnya di daerah sawah tadah hujan agar daerah tersebut tidak hanya mengandalkan air dari hujan saja. Sawah yang memiliki aliran irigasi baik dan cukup akan memudahkan petani untuk melakukan penanaman padi sehingga mereka tidak perlu risau memikirkan ketersediaan air. Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Dinas Pertanian Kabupaten Jombang hendaknya memberi edukasi kepada para pemuda di Kabupaten Jombang mengenai konsep pertanian agroindustri, hal ini dimaksudkan agar banyak pemuda yang tertarik terjun di bidang pertanian untuk menanggulangi masalah ketiadaan pekerja di bidang pertanian. Penguatan sektor agroindustri hulu yang dimaksud adalah memastikan ketersediaan benih, pupuk, pestisida, saluran irigasi, serta alat-alat dan mesin pertanian. Pemerintah Kabupaten Jombang hendaknya meningkatkan upaya manajemen harga gabah untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang tidak menguntungkan sebagai evaluasi subsistem agroindustri hilir yang belum terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 2003. Jombang Dalam Angka 2003. Kabupaten Jombang, BPS Jombang.
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 2010. Jombang Dalam Angka 2010. Kabupaten Jombang, BPS Jombang.
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 2019. Jombang Dalam Angka 2019. Kabupaten Jombang, BPS Jombang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 2021. Jombang Dalam Angka 2021. Kabupaten Jombang, BPS Jombang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 2021. Kecamatan Kesamben Dalam Angka 2021. Kabupaten Jombang, BPS Jombang.
 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang. 1998. *Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998/1999*. Kabupaten Jombang.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang. 1998. *Keputusan Bupati Nomor 73 Tahun 1998 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, dan Jagung 2001 (Gema Palagung 2001)*. Kabupaten Jombang.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang. 1999. *Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang*. Kabupaten Jombang.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang. 1999. *Keputusan Bupati Nomor 21A Tahun 1999 Tentang Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999/2000*. Kabupaten Jombang.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang. 1999. *Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pengguliran Dana Proyek Bantuan Denfarm Tanaman Padi Sistem Legowo dan Dempolt Pengembangan Jagung Hibrida Pada Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang*. Kabupaten Jombang.

Bupati Kabupaten Jombang. 2001. *Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Satuan Pelaksana dan Satuan Penggerak Bimas di Kabupaten Jombang*. Kabupaten Jombang.

Bupati Kabupaten Jombang. 2001. *Keputusan Bupati Nomor 47A Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001-2005*. Kabupaten Jombang.

Bupati Kabupaten Jombang. 2006. *Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2006*. Kabupaten Jombang.

Bupati Kabupaten Jombang. 2009. *Keputusan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Irigasi*. Kabupaten Jombang.

- Bupati Kabupaten Jombang. 2019. *Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023*. Kabupaten Jombang.
- Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Jombang. 1998. *Keputusan Asisten Administrasi Pembangunan/Ketua Pelaksana Harian Bimas tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Jombang Tahun 1998/1999*. Kabupaten Jombang.
- Pemerintah Kabupaten Jombang. 1999. *Keputusan Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang*. Kabupaten Jombang.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom Presiden Republik Indonesia*. Republik Indonesia.
- B. Surat Kabar**
- Kompas. 2009. "Pemerintah Janjikan Beli Padi Organik Petani". Kompas.com, 9 Agustus 2009.
- Republika. 2003. "Sejak Tahun 1986, Menunggu Dam Tak Kunjung Tiba". Koran Republika, 4 Juni 2003.
- Republika. 2003. "Pupuk Supramin Dilarang Beredar". Koran Republika, 18 Juni 2003.
- Republika. 2003. "Hama Tikus Mulai Menyerang". Koran Republika, 25 Juni 2003.
- Republika. 2003. "Hama Tikus Diduga Serang Ratusan Hektar Lahan Padi". Koran Republika, 28 Juni 2003.
- Surya. 2004. "Urea Subsidi Rp 1.050/kg". Koran Surya, 8 Maret 2004.
- Surya. 2006. "Pesan Basmi Hama dengan Kebersamaan". Koran Surya, 10 Mei 2006.
- Surya. 2006. "HET Pupuk Bersubsidi Naik Rp 150/kg". Koran Surya, 17 Mei 2006.
- Surya. 2006. "Ribuan Hektar Sawah Terancam Kering". Koran Surya, 24 Mei 2006.
- Surya. 2006. "Pesan Bupati Suyanto Pada Temu SLPHT Petani Harus Pahami Manajemen Pertanian". Koran Surya, 12 Juni 2006.
- Surya. 2006. "Sub-upaya Mensejahterakan Petani Utara Brantas Pemkab Jombang Bangun Waduk dan 10 Embung". Koran Surya, 31 Agustus 2006.
- Surya. 2007. "Bupati Suyanto Buka Normalisasi Irigasi 5 Desa". Koran Surya, 21 Desember 2007.
- Surya. 2008. "Jelang Panen Raya, Harga Gabah Anjlok". Koran Surya, 2 Maret 2008.
- Surya. 2008. "Suyanto Minta Bulog Longgarkan Syarat Pembelian Gabah". Koran Surya, 29 Maret 2008.
- Surya. 2008. "Padi Siap Panen Rusak". Koran Surya, 2 April 2008.
- Surya. 2008. "Pupuk Menghilang di Jombang". Koran Surya, 8 Mei 2008.
- Surya. 2008. "Segel 12,5 Ton Pupuk". Koran Surya, 11 Mei 2008.
- Surya. 2008. "Makin Langka Pupuk Hilang di Jombang". Koran Surya, 24 Mei 2008.
- Surya. 2009. "Jombang Antisipasi Jatuhnya Harga Gabah." Koran Surya, 21 Februari 2009.
- Surya. 2009. "Mentan Puji Pola Tanam SRI Jombang". Koran Surya, 13 Agustus 2009.
- Surya. 2010. "Puluhan Hektar Padi Gagal Panen". Koran Surya, 17 Maret 2010.
- Surya. 2010. "Harga Gabah Rendah, Pupuk Naik". Koran Surya, 12 April 2010.
- C. Buku**
- Abbas, S. 1999. *Revolusi Hijau dengan Swasembada Beras dan Jagung*. Jakarta, Setdal Bimas.
- Abdulrachman, Sarlan., dkk. 2012. *Sistem Tanam Legowo*. Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
- Arifin & Arsyad Biba. 2017. *Pengantar Agroindustri*. Bandung, Mujahid Press.
- Dyanasari & E. Yusnita, 2018. *Pembangunan Pertanian*. Sleman, Deepublish.
- Hefner, R. W. 1999. *Geger Tengger Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta, hal 133.
- Husodo, S.Y., dkk. 2009. *Pertanian Mandiri Pandangan Strategis Para Pakar*

untuk Kemajuan Pertanian Indonesia. Depok, Penebar Swadaya.

Jamaludin, A. N. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung, CV Pustaka Setia.

Kasdi, Aminuddin., Wisnu, Rojil N.B.A. 2018. *Memahami Sejarah*. Surabaya, Unesa University Press.

Kementerian Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2013. *Sistem Tanam Legowo*. Jakarta, Kementerian Pertanian.

Purba, D.W., dkk. 2020. Pengantar Ilmu Pertanian. Yayasan Kita Menulis, hal 1.

Soetrisno & A. Suwandari. 2016. *Pengantar Ilmu Pertanian Agraris Agribisnis Industri*. Malang, Citra Intrans Selaras.

D. Jurnal

Nuryanto, B. 2018. Pengendalian Penyakit Tanaman Padi Berwawasan Lingkungan Melalui Pengelolaan Komponen Epidemik. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*.

Setyorini, D., & Abdurachman, S. 2009. Pengelolaan Hara Mineral Tanaman Padi. *Jurnal Balai Besar Penelitian Tanaman Padi*.

Soelaksono, B., dkk 2003 "Pola Penanaman dan Pemasaran Padi di Desa Mojosari, Kabupaten Jombang Tahun 2001" *Laporan Lapangan Lembaga Penelitian SMERU dengan Research School of Pacific and Asian Studies of the Australian National University*.

E. Wawancara

Pak Fauzi, diwawancarai oleh Chusnul Nurainin, Juni 2023, Universitas Negeri Surabaya.

Pak Fatulloh, diwawancarai oleh Chusnul Nurainin, Juni 2023, Universitas Negeri Surabaya.

Pak Gatot, diwawancarai oleh Chusnul Nurainin, Juni 2023, Universitas Negeri Surabaya.

Pak Sunali, diwawancarai oleh Chusnul Nurainin, Juni 2023, Universitas Negeri Surabaya.

F. Artikel/Sumber Internet

Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang. 2022. Profil Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. <https://jombangkab.go.id/opd/wonosalam/pages/profil>

Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang. 2019. Kondisi Ekonomi Kabupaten Jombang. <https://jombangkab.go.id/pages/keadaan-ekonomi>